

BUDAYA PATRIARKI SEBAGAI FONDASI KETIMPANGAN GENDER DI INDONESIA

Dewi Agustina^{1*}, Faisal Alhafiz Damanik², Shella Ramadhayanti³, Shafa Kirana⁴, Diva Nazwa Harahap⁵, Aginta Nur Amelia Sipahutar⁶, Fadilah Annisa⁷, Sarah Haq Azzahrah⁸
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3,4,5,6,7,8}

*Corresponding Author : faisaldamanik2301@gmail.com

ABSTRAK

Ketimpangan gender di Indonesia merupakan fenomena yang telah berlangsung lama dan mengakar dalam struktur sosial masyarakat. Budaya patriarki menjadi salah satu fondasi utama yang melanggengkan subordinasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari rumah tangga, pendidikan, hingga akses ekonomi dan politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana budaya patriarki membentuk dan mempertahankan ketimpangan gender di Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian berada di Medan, Deli Serdang, dan Binjai, dilakukan pada bulan Mei 2025. Populasi penelitian adalah perempuan usia 20–50 tahun, dengan sampel sebanyak 30 orang yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, kemudian dianalisis menggunakan metode tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma patriarki tercermin dalam pembagian peran gender yang timpang, pelanggaran stereotip, serta rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa budaya patriarki menjadi akar struktural ketimpangan gender dan memerlukan intervensi sosial, pendidikan, serta kebijakan afirmatif untuk mewujudkan kesetaraan gender yang berkelanjutan.

Kata kunci : budaya patriarki, gender, ketimpangan sosial, peran perempuan, struktur sosial

ABSTRACT

Gender inequality in Indonesia is a long-standing phenomenon that is deeply rooted in the social structure of society. Patriarchal culture serves as one of the main foundations that perpetuate the subordination of women in various aspects of life, ranging from household affairs and education to access to economic and political opportunities. This study aims to analyze how patriarchal culture shapes and sustains gender inequality in Indonesia. The research uses a qualitative design with a case study approach. The study was conducted in Medan, Deli Serdang, and Binjai in May 2025. The study population consisted of women aged 20–50 years, with a sample of 30 participants selected using purposive sampling techniques. Data were collected through in-depth interviews and participatory observation, and then analyzed using thematic methods. The findings reveal that patriarchal norms are reflected in the unequal division of gender roles, the reinforcement of stereotypes, and the limited participation of women in public decision-making. The study concludes that patriarchal culture is the structural root of gender inequality and requires social, educational, and affirmative policy interventions to achieve sustainable gender equality.

Keywords : patriarchal culture, gender, social inequality, role of women, social structure

PENDAHULUAN

Ketimpangan gender merupakan persoalan struktural yang bersifat global dan terus menjadi tantangan besar dalam pembangunan sosial di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun berbagai kebijakan telah dirancang untuk mempromosikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, realitas empiris menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih mengakar kuat dalam berbagai sektor kehidupan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia hanya sebesar 54,42%, jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mencapai 83,02%. Selain itu,

perempuan masih menghadapi ketimpangan upah, keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi, layanan kesehatan reproduktif yang tidak merata, serta keterwakilan yang rendah dalam bidang politik dan kepemimpinan (Nurdin et al., 2024). Ketimpangan-ketimpangan tersebut tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil dari sistem sosial-budaya yang telah berlangsung lama dan secara historis melegitimasi dominasi laki-laki atas perempuan (Munandar et al., 2024). Salah satu sistem sosial yang paling berpengaruh dalam mereproduksi ketidaksetaraan ini adalah budaya patriarki. Patriarki didefinisikan sebagai struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dominan dalam kehidupan publik dan privat, serta mengonstruksi peran gender secara hierarkis (Hafani & Buldani, 2025).

Dalam masyarakat patriarkal, norma sosial, nilai budaya, dan institusi cenderung memperkuat superioritas laki-laki dan mereduksi peran perempuan menjadi subaltern (Ayu Andari Putri Alwaris & Suhufi, 2024). Di Indonesia, budaya patriarki mewujudkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam lingkungan keluarga, institusi pendidikan, ajaran keagamaan, serta media massa (Syahrizan & Hamidi Siregar, 2024). Keluarga sebagai institusi primer sering kali menjadi wahana utama dalam transmisi nilai-nilai patriarkal kepada generasi berikutnya melalui pembagian kerja domestik yang timpang dan pola asuh yang membedakan anak laki-laki dan perempuan secara tajam (Monika & Dara, 2024). Sementara itu, kurikulum pendidikan formal masih banyak yang tidak responsif terhadap isu kesetaraan gender, dan media massa kerap kali mereproduksi stereotip gender yang memperkuat inferioritas perempuan (Muhammad, 2025). Hal ini berdampak pada terbentuknya persepsi sosial yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang bersifat emosional, lemah lembut, dan kurang rasional, sehingga dianggap tidak cocok untuk memegang posisi kepemimpinan atau peran publik lainnya (Tanjung et al., 2024).

Meskipun pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan afirmatif, seperti kebijakan kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif (Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu) dan strategi pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) dalam pembangunan nasional, implementasi kebijakan tersebut belum optimal. Banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari resistensi budaya, kurangnya kapasitas kelembagaan, hingga lemahnya komitmen politik dalam mendorong kesetaraan gender yang substansial (Nurdin, 2024). Dalam praktiknya, kebijakan afirmatif sering kali hanya berfungsi sebagai simbol representasi, bukan transformasi. Dengan kata lain, keberadaan perempuan dalam posisi formal tidak secara otomatis menghapus subordinasi struktural yang dihadapi perempuan dalam kehidupan sehari-hari (Karwati, 2021). Oleh karena itu, memahami budaya patriarki sebagai fondasi ketimpangan gender menjadi sangat penting dalam upaya mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan (Emilia & Susiyanti, 2024). Kajian terhadap patriarki tidak hanya penting untuk mengungkap mekanisme reproduksi ketimpangan, tetapi juga untuk merumuskan strategi intervensi yang mampu menysasar akar persoalan secara sistemik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana budaya patriarki bekerja sebagai landasan ideologis dan struktural dalam membentuk serta mempertahankan ketimpangan gender di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi pendekatan-pendekatan strategis yang dapat digunakan dalam rangka melakukan transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus yang bersifat eksploratif dan deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam pengalaman dan pemaknaan perempuan terhadap diskriminasi berbasis gender dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan representasi wilayah urban dan semi-urban, yakni di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang,

dan Kota Binjai. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2025. Populasi dalam penelitian ini adalah perempuan usia produktif antara 20 hingga 50 tahun yang memiliki pengalaman diskriminasi berbasis gender. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan jumlah informan sebanyak 30 orang yang terdiri dari ibu rumah tangga, buruh perempuan, aktivis perempuan, mahasiswa, dan pekerja profesional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap media maupun kebijakan yang relevan. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan fleksibilitas dalam eksplorasi data lapangan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dengan tahapan coding terbuka, kategorisasi, dan interpretasi untuk menemukan pola-pola makna yang berkaitan dengan bentuk dan pengalaman diskriminasi gender. Penelitian ini juga telah melalui proses uji etik untuk memastikan perlindungan hak-hak informan, menjaga kerahasiaan identitas partisipan, serta memperoleh persetujuan sukarela (*informed consent*) sebelum proses wawancara dilakukan.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai dan praktik patriarki masih sangat dominan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Temuan utama dapat disimpulkan dalam beberapa kategori:

Tabel 1. Pembagian Peran Gender Dalam Rumah Tangga

Jenis Aktivitas	Perempuan (%)	Laki-laki (%)
Mengurus anak & rumah	90.0	10.0
Menjadi pencari nafkah utama	15.0	85.0
Pengambil keputusan keluarga	35.0	65.0

Berdasarkan tabel yang disajikan yaitu "Tabel 1. Pembagian Peran Gender Dalam Rumah Tangga", dapat dilihat dengan jelas bahwa pembagian peran antara perempuan dan laki-laki di dalam rumah tangga di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat terhadap pola patriarki. Pola ini mengindikasikan bahwa laki-laki masih lebih dominan dalam beberapa peran kunci dalam keluarga, sementara perempuan lebih banyak dibebani dengan tugas-tugas domestik. Angka yang tercantum dalam tabel menunjukkan bahwa sebanyak 90,0% perempuan mengambil peran utama dalam mengurus anak dan rumah tangga, sementara hanya 10,0% laki-laki yang menjalankan peran ini. Hal ini mencerminkan bahwa tanggung jawab domestik secara sosial dan kultural masih dianggap sebagai domain perempuan. Dalam kerangka nilai-nilai patriarki, perempuan sering kali diposisikan sebagai pihak yang "alami" atau "kodrati" untuk mengasuh anak dan merawat rumah. Akibatnya, peran ini tidak hanya diterima secara sosial, tetapi juga seringkali tidak diakui sebagai kerja yang produktif atau penting secara ekonomi.

Dominasi perempuan dalam urusan rumah tangga ini juga berpotensi menghambat partisipasi mereka dalam sektor publik atau ekonomi karena mereka menghadapi beban ganda, yaitu sebagai pengurus rumah tangga sekaligus sebagai tenaga kerja di luar rumah (Nurmalayasyari, 2024). Beban ganda ini berdampak pada kesejahteraan fisik, psikologis, serta kesempatan pengembangan diri perempuan. Sebaliknya, data menunjukkan bahwa 85,0% laki-laki menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga, sedangkan hanya 15,0% perempuan yang menjalankan peran ini. Hal ini menegaskan bahwa dalam sistem sosial patriarkal, laki-laki masih dianggap sebagai kepala keluarga dan pemikul tanggung jawab ekonomi utama. Peran ini sering dipersepsikan sebagai indikator kekuasaan dan kontrol dalam rumah tangga, di mana yang memegang kendali atas sumber daya ekonomi cenderung memiliki posisi yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan.

Perempuan, meskipun turut bekerja, sering kali dianggap hanya berperan sebagai pencari nafkah tambahan atau sekadar pelengkap penghasilan keluarga. Hal ini turut memperkuat ketimpangan gender dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, kepemilikan aset, dan jaminan sosial. Dalam hal pengambilan keputusan keluarga, sebanyak 65,0% laki-laki mendominasi peran ini, sedangkan perempuan hanya 35,0%. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan mungkin terlibat dalam diskusi rumah tangga, keputusan akhir masih lebih banyak berada di tangan laki-laki. Ini menunjukkan bahwa struktur kekuasaan dalam rumah tangga masih bersifat hierarkis dengan laki-laki sebagai figur otoritatif. Ketimpangan dalam pengambilan keputusan memiliki implikasi serius terhadap keadilan gender karena perempuan menjadi kurang terwakili dalam keputusan-keputusan penting yang menyangkut kehidupan mereka sendiri maupun masa depan anak-anak. Ketidakseimbangan ini juga mencerminkan rendahnya pengakuan terhadap kapasitas intelektual, pengalaman, dan pengetahuan perempuan dalam urusan rumah tangga (Murtado et al., 2024).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai patriarki masih mengakar kuat dalam pembagian peran gender di ranah domestik di Indonesia. Perempuan masih terbebani oleh tugas-tugas rumah tangga dan pengasuhan anak, sementara laki-laki cenderung memegang peran sebagai pencari nafkah utama dan pengambil keputusan dalam keluarga. Ketimpangan ini menjadi penghalang utama dalam upaya mencapai kesetaraan gender yang sesungguhnya. Dalam konteks pembangunan sosial, hasil ini menunjukkan urgensi untuk melakukan transformasi budaya dan kebijakan publik yang lebih progresif. Upaya peningkatan kesadaran gender, pembagian kerja yang lebih adil di rumah tangga, serta dukungan kebijakan seperti cuti ayah, fasilitas penitipan anak, dan pendidikan kesetaraan gender sejak dini sangat diperlukan untuk mengubah pola pikir masyarakat dan mengurangi dominasi nilai patriarki.

Pernyataan informan dalam wawancara mencerminkan realitas kompleks yang dihadapi oleh banyak perempuan di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia, yaitu adanya dualitas tuntutan peran antara ranah domestik dan publik. Meskipun telah mengalami kemajuan dalam akses terhadap pendidikan dan pekerjaan profesional, perempuan masih dibebani ekspektasi sosial yang kuat untuk tetap menjalankan peran domestik tradisional, seperti mengurus rumah tangga, merawat anak, serta mendampingi suami. Tekanan sosial ini tidak hanya datang dari lingkungan keluarga, tetapi juga dari masyarakat luas yang masih memegang teguh norma-norma patriarkal yang menempatkan perempuan sebagai penjaga utama urusan domestik. Banyak perempuan profesional yang merasa harus “membuktikan” bahwa mereka tetap mampu menjalankan peran domestik meskipun sibuk di ranah profesional. Hal ini sering kali menciptakan beban ganda yang melelahkan secara fisik maupun mental. Tidak jarang pula, pencapaian mereka di bidang pekerjaan justru direduksi atau dipertanyakan jika dianggap mengorbankan peran sebagai ibu atau istri.

Selain tekanan sosial dalam lingkup kultural, perempuan juga menghadapi resistensi secara struktural. Di banyak tempat kerja, masih terdapat kebijakan atau praktik yang kurang ramah terhadap kebutuhan spesifik perempuan, seperti kurangnya cuti melahirkan yang memadai, tidak tersedianya fasilitas penitipan anak, hingga budaya kerja yang mengutamakan jam panjang dan kehadiran fisik yang sering kali tidak fleksibel. Hal ini menyulitkan perempuan untuk berpartisipasi secara penuh di dunia kerja atau dalam aktivitas publik lainnya. Di sisi lain, resistensi kultural juga muncul dalam bentuk stigma dan stereotip terhadap perempuan yang aktif di ruang publik. Mereka sering kali dianggap melanggar kodrat atau dinilai “kurang feminin” karena terlibat dalam urusan sosial, politik, atau ekonomi. Bahkan dalam komunitas yang mengedepankan kesetaraan pun, bias-bias semacam ini masih sering dijumpai dalam bentuk yang lebih halus, seperti komentar yang meremehkan, pelecehan verbal, atau pengabaian terhadap pendapat perempuan dalam diskusi publik.

Dokumentasi



Gambar 1. Dokumentasi Penelitian

PEMBAHASAN

Budaya patriarki masih merupakan sistem dominan yang secara mendalam membentuk relasi gender di Indonesia. Sebagai suatu struktur sosial yang bercorak hierarkis, patriarki menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dalam berbagai ranah—keluarga, masyarakat, ekonomi, pendidikan, hingga negara. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa patriarki bukan sekadar warisan historis, tetapi juga sistem yang aktif dan dinamis dalam memproduksi serta mereproduksi ketimpangan melalui berbagai saluran seperti sosialisasi keluarga, norma budaya, regulasi negara, pendidikan formal, media massa, serta institusi keagamaan. Dalam konstruksi sosial masyarakat Indonesia, peran gender dibentuk dan dipelihara melalui dikotomi ruang publik-domestik yang rigid. Perempuan secara historis dikonstruksikan sebagai penanggung jawab ranah domestik, seperti pengasuhan anak, pelayanan emosional dalam rumah tangga, dan urusan rumah. Sementara laki-laki diposisikan sebagai aktor utama dalam ekonomi, pengambil keputusan, dan pemegang otoritas publik. Dikotomi ini menciptakan stratifikasi sosial berbasis gender yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.

Berbagai instrumen sosial mendukung internalisasi ketimpangan ini sejak usia dini. Di ranah pendidikan, misalnya, kurikulum masih sering mereproduksi peran-peran gender yang bias. Buku pelajaran menggambarkan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang patuh, lembut, dan setia, sementara laki-laki digambarkan sebagai pencari nafkah yang rasional, kuat, dan berani. Representasi semacam ini bukan hanya mencerminkan bias struktural, tetapi juga memperkuat imajinasi kolektif masyarakat tentang “peran alamiah” laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, patriarki tidak hanya menciptakan ketimpangan, tetapi juga menormalkannya.

Tafsir Agama, Adat dan Kuasa Simbolik

Dalam konteks Indonesia yang plural secara budaya dan keagamaan, patriarki memperoleh legitimasi ganda dari nilai adat dan interpretasi konservatif terhadap ajaran agama. Blackburn (2004) dan Utomo (2016) menggarisbawahi bahwa peran dominan laki-laki dalam masyarakat tidak jarang diperkuat oleh tafsir agama yang menempatkan perempuan sebagai makhluk

kedua, pembantu, atau pengikut. Hal ini terlihat, misalnya, dalam ceramah keagamaan yang menekankan ketaatan istri, larangan menjadi pemimpin bagi perempuan, serta glorifikasi peran perempuan hanya sebagai istri yang baik dan ibu yang melayani. Dukungan terhadap struktur patriarki juga datang dari lembaga adat. Meskipun terdapat masyarakat yang menganut sistem matrilineal seperti Minangkabau, namun studi Yerix Ramadhani (2024) menunjukkan bahwa dalam praktiknya, otoritas tetap berada di tangan laki-laki, terutama dalam pengambilan keputusan dalam keluarga dan peran publik. Ini menunjukkan bahwa struktur simbolik patriarki dapat tetap hidup bahkan di dalam sistem adat yang secara struktural mendukung perempuan, karena dominasi itu tidak hanya berada dalam garis keturunan, tetapi juga dalam pola relasi kekuasaan (Ramadhani, 2022).

Ranah Kekerasan : Tubuh dan Kontrol Sosial

Salah satu manifestasi nyata dari dominasi patriarki adalah tingginya kekerasan berbasis gender. Studi oleh Eleanora dan Supriyanto (2020) membuktikan bahwa kekerasan domestik terhadap perempuan sering kali dibenarkan oleh masyarakat dengan alasan bahwa laki-laki memiliki hak untuk “mendidik” atau “mengatur” istri (Eleanora & Supriyanto, 2020). Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan tidak terbatas pada fisik, tetapi juga psikologis, seksual, dan ekonomi. Norma sosial yang patriarkal menghalangi korban untuk melapor, serta membuat mereka menyalahkan diri sendiri atau merasa malu. Dalam banyak kasus, lembaga hukum dan penegak keadilan juga masih bersikap bias terhadap korban perempuan. Kekerasan juga terjadi dalam relasi pacaran. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa perempuan muda kerap mengalami bentuk kekerasan emosional dan psikologis dari pasangannya, termasuk pengawasan ketat, ancaman verbal, hingga pemaksaan seksual (Umaimah, 2023). Budaya patriarki membentuk pola relasi di mana laki-laki berhak mengontrol pasangan perempuan dengan alasan cinta atau perlindungan, padahal yang terjadi adalah dominasi dan pelanggaran batas otonomi personal.

Politik dan Representasi Gender

Ketimpangan gender juga tercermin dalam keterwakilan perempuan dalam ranah politik. Studi oleh (Asiyah et al., 2021) dan (Wayan & Nyoman, 2020) mengungkapkan bahwa dalam pilkada lokal, perempuan sering kali gagal memperoleh dukungan karena adanya stereotip bahwa perempuan tidak cocok menjadi pemimpin. Budaya patriarki meresap hingga ke dalam partai politik yang enggan mencalonkan perempuan, serta masyarakat yang enggan memilih kandidat perempuan. Partisipasi politik perempuan terbatas bukan karena kurangnya kapasitas, melainkan karena terbatasnya akses terhadap sumber daya politik dan dukungan struktural.

Hak Reproduksi dan Tubuh Perempuan

Studi (Amraeni et al., 2021) menunjukkan bahwa otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kontrasepsi sangat dipengaruhi oleh sistem budaya setempat. Dalam masyarakat yang patriarkal, perempuan sering kali tidak memiliki kebebasan untuk memutuskan penggunaan alat kontrasepsi karena harus mendapatkan persetujuan suami. Dalam konteks ini, tubuh perempuan bukan miliknya sendiri, melainkan milik keluarga, masyarakat, bahkan negara. Ini menunjukkan bagaimana patriarki bekerja dalam level paling privat: tubuh dan reproduksi.

Patriarki Sebagai Rezim Kuasa Multidimensional

Dalam kerangka feminisme struktural, patriarki dipahami bukan sekadar kumpulan nilai atau keyakinan, tetapi sebagai rezim kuasa multidimensional yang bekerja melalui berbagai ranah: ekonomi, politik, simbolik, ideologis, dan kultural. Ia tidak bersifat kasat mata, tetapi bekerja melalui repetisi dan institusionalisasi. Tubuh perempuan, sebagai contoh, tidak hanya

dikontrol oleh norma berpakaian atau standar moral, tetapi juga melalui hukum negara, kebijakan publik, dan norma agama yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan perempuan. Rezim patriarki bersifat hegemonik karena diterima secara sukarela oleh masyarakat. Melalui proses naturalisasi, perempuan pun kadang ikut melestarikan nilai-nilai yang menempatkan dirinya dalam posisi subordinat. Proses ini menunjukkan bahwa patriarki bukan hanya didukung oleh kekuatan laki-laki, tetapi juga oleh ketidaksadaran struktural dan internalisasi sosial yang dalam.

Semua studi tersebut menegaskan bahwa patriarki bekerja dalam berbagai bentuk: simbolik, struktural, politik, kultural, bahkan spiritual. Oleh karena itu, perubahan yang dibutuhkan harus bersifat holistik dan berlapis. Reformasi kebijakan dan desain kurikulum pendidikan yang sensitif gender harus dipadukan dengan pendekatan transformasi budaya dan dekonstruksi terhadap tafsir keagamaan yang konservatif. Intervensi struktural seperti pengarusutamaan gender dalam sistem hukum, anggaran pemerintah, dan kelembagaan negara harus dilengkapi dengan pendidikan kritis yang membongkar narasi dominasi sejak dini.

Secara teoritis, kajian ini memperkuat perspektif feminisme struktural yang memandang patriarki sebagai rezim kuasa multidimensional. Dalam pandangan ini, tubuh perempuan dikontrol tidak hanya melalui norma sosial tentang moralitas dan pakaian, tetapi juga oleh regulasi negara terkait kesehatan reproduksi dan partisipasi publik. Rezim ini bersifat hegemonik, yakni ia bekerja bukan dengan cara koersif, melainkan melalui persetujuan sosial dan pengulangan simbolik yang terus-menerus. Dengan demikian, patriarki di Indonesia bukan hanya warisan sejarah, melainkan kekuatan aktif yang mereproduksi ketimpangan secara sistematis. Studi ini tidak hanya memberikan pemetaan kritis atas relasi kuasa gender di berbagai sektor, tetapi juga menekankan pentingnya pendekatan transformatif lintas sektor dan lintas generasi untuk membongkar fondasi patriarki yang telah mengakar dalam struktur sosial kita.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa budaya patriarki merupakan fondasi struktural yang melanggengkan ketimpangan gender di Indonesia. Melalui pembagian peran yang timpang dalam rumah tangga, penguatan stereotip gender, rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta kendala sistemik di ranah sosial, politik, ekonomi, dan reproduksi, patriarki terus membatasi ruang gerak perempuan dan memperkuat dominasi laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Temuan dari penelitian ini mengonfirmasi bahwa patriarki bukan hanya sistem yang diwariskan secara historis, tetapi juga direproduksi secara aktif oleh institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, agama, media massa, hingga kebijakan negara. Bahkan dalam konteks masyarakat modern, perempuan masih menghadapi tekanan untuk menjalankan peran domestik secara penuh meskipun mereka telah terlibat dalam dunia profesional dan publik.

Secara teoritis, hasil penelitian ini mendukung pendekatan feminisme struktural yang memandang patriarki sebagai rezim kekuasaan multidimensional yang bekerja melalui simbol, norma sosial, struktur hukum, hingga ideologi budaya. Hal ini menjadikan ketimpangan gender sebagai persoalan sistemik yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan parsial atau simbolis semata. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan gender yang berakar pada budaya patriarki, dibutuhkan intervensi yang bersifat transformatif dan lintas sektor. Upaya tersebut harus mencakup reformasi pendidikan yang responsif gender, penguatan kebijakan afirmatif yang substantif, transformasi tafsir keagamaan yang lebih adil gender, serta perubahan norma sosial melalui pendidikan publik dan advokasi komunitas. Perlu juga dibangun kesadaran kritis sejak usia dini tentang pentingnya relasi gender yang setara dan saling menghormati. Dengan demikian, studi ini tidak hanya memberikan gambaran empiris

mengenai bentuk dan mekanisme ketimpangan gender akibat patriarki, tetapi juga mendorong pengembangan strategi perubahan sosial yang holistik guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih adil, setara, dan inklusif gender.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Kami menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing utama yang telah dengan penuh kesabaran dan ketulusan membimbing, memberikan arahan, masukan, serta motivasi selama proses penyusunan penelitian ini. Bimbingan dan ilmu yang diberikan sangat berarti dan menjadi bekal berharga bagi kami dalam menyelesaikan karya ini. Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, serta dukungan administratif maupun teknis selama proses penelitian dan penyusunan karya ini berlangsung. Tanpa dukungan institusi yang luar biasa ini, proses penyelesaian penelitian tentu tidak akan berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwaris, S. A. P., Misbahuddin, & Suhufi, M. (2024). Komparasi peranan perempuan lingkup domestik dan publik. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1).
- Amraeni, Y., Kamso, S., Sabarinah, & Purwastyastuti. (2021). Pola *Unmet Need* kontrasepsi modern di Indonesia: Analisis lanjutan data SDKI 2007, 2012 dan 2017. *Jurnal Kesmas Jambi (JKMJ)*, 5(2).
- Asiyah, Astuti, A., & Nuraini. (2021). Analisis partisipasi politik perempuan dalam perspektif hukum Islam. *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 6(1).
- Eleanora, F., & Supriyanto, E. (2020). *Violence against women and patriarkhi culture in Indonesia. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(9).
- Emilia, S. H., & Susiyanti, A. (2024). Peranan hukum dalam menangani pengaruh budaya masyarakat patriarki. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24).
- Hafani, M. H., & Buldani, M. N. (2025). Patriarki dan kekuasaan: Bagaimana laki-laki mengendalikan kehidupan dalam keluarga. *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 7(1).
- Karwati, L. (2020). Menolak subordinasi gender berdasarkan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan nasional menjelang bonus demografi 2035. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PES*, 5(2).
- Monika, D., & Dora, N. (2024). Ketimpangan gender dalam pola asuh anak perempuan dan laki-laki pada masyarakat suku Jawa di Kota Binjai Kel. Timbang Langkat. *Jurnal Ilmu Pendidikan Progresif*, 8(11).
- Muhammad. (2025). Isu gender dalam kurikulum pendidikan serta tantangan dan solusi. *At-Ta'lim: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, 7(1).
- Munandar, A., & Susanti, E. (2024). Negosiasi identitas gender dalam arena politik hukum Islam: Studi kasus RUU ketahanan keluarga dan respons ormas Islam. *Al Fuadiy: Hukum Keluarga Islam*, 6(2).
- Murtado, A., Kurniawan, A. F., & Sa'ad, S. (2024). Diskriminasi gender dalam pendidikan dan tempat kerja: Analisis faktor sosial dan agama. *Journal on Education*, 6(3), 17510–17524.
- Nurdin, A. A., Mawaddah, A. R., Abdullah, N. P., Yadilla, N., & Aini, Q. (2024). Pengaruh keterbatasan akses pendidikan terhadap tingginya angka putus sekolah dikaitkan dengan SDGs. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisipline*, 2(9).

- Nuridin. (2024). Memahami isu gender dan ketidaksetaraan gender di Indonesia pasca era reformasi: Perspektif pembangunan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1).
- Nurmalasyari, N., Sajidah, N., Alviani, D., Bila, S., & Rusliawan, S. (2024). Kebijakan publik dan peran perempuan di tengah budaya patriaki. *Jurnal Sosial Politik Humaniora (JSPH)*, 1(3).
- Ramadhani, Y. (2022). Budaya patriarki dalam tradisi pernikahan di Sumatera Barat. *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 7(1).
- Syahrizan, M., & Siregar, A. H. (2024). Budaya patriarki dalam rumah tangga menurut perspektif hukum Islam. *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, 5(1).
- Tanjung, Y., Ishomuddin, Wahyudi, & Saleh, A. (2024). Kesenjangan dan keadilan gender dalam keluarga. *UMSU Press*.
- Umaimah, & Legino, R. (2023). *Power relations and patriarchy politics on dating violence. Nyimak Journal of Communication*, 7(1).
- Wayan, K., & Nyoman, S. (2020). *Political phenomenon of women in culture patriarchy in Gianyar, Bali. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(3).